



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENYUSUNAN KAJIAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN**

2024

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH**

Jl. Kapten Muslihat No. 21, RT. 001/RW. 001, Pabaton, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor 16122
Tlp. (0251) 8338052, website:www.bappeda.kotabogor.go.id



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH
BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Nomor SOP	: SOP/LITBANG.3/002
Lintas Fungsi Peta Proses Bisnis	: Melaksanakan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan
Aktifitas Lintas Fungsi	: Melaksanakan penyusunan kajian sektor Sosial dan Kependudukan
Tgl. Pembuatan	: 03 Januari 2024
Tgl. Revisi	:
Tgl. Efektif	: 03 Januari 2024
Disahkan oleh	: <p align="center">Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Kota Bogor</p>  <small>Yusuf M. Shudi, S.T., M.P. NIP. 197707062006041018</small>
Judul SOP	: PENYUSUNAN KAJIAN SOSIAL BUDAYA DAN PEMERINTAHAN







DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
2. Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
3. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 tentang satu data 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
7. Peraturan Presiden nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 - 2024
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

KUALIFIKASI PELAKSANA

- 1 Pendidikan minimal lulusan S1
- 2 Memahami Tugas Dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bogor
- 3 Memahami Organisasi Perangkat Daerah Kota Bogor
- 4 Memahami Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Materi Perencanaan Pembangunan Daerah dan kelitbangan
- 5 Memahami Implementasi data dan informasi secara elektronik
- 6 Penguasaan pemahaman tentang Sosial Budaya dan Pemerintahan

DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 13. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 147 tahun 2019 tentang Satu Data Kota Bogor 14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 59 Tahun 2023 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah.	
KETERKAITAN	PERALATAN/ PERLENGKAPAN
1. SOP Pengadaan (PBJ) 2. SOP Pengendalian Arsip	1. Komputer/ Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika prosedur tidak dilaksanakan dengan baik maka dapat berakibat tidak terselenggaranya Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan secara optimal sehingga organisasi tidak mendapatkan inputan hasil kajian yang berkualitas	1. Indikasi Program dan Kegiatan 2. Kompilasi Panduan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan 3. SK Tim Kerja Pelaksanaan Kajian 4. KAK Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan 5. Rekaman Pengadaan (PBJ) Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan 6. Laporan Hasil Sosialisasi Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Analisis Litbang. Sosbudpem	Analisis Kebijakan	Kabid. Litbang	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Kerja Pelaksana Kajian	PPK	Mitra Kerja	Pihak-pihak Berkepentingan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menjaring masukan terkait kajian Analisis Kebijakan menyampaikan ke Analisis Kebijakan										Usulan Bidang dan Perangkat Daerah	300 menit	Indikasi program dan kegiatan	
2	Mencari panduan dari Pemerintah Provinsi dan atau Pemerintah Pusat terkait peraturan kegiatan atau kajian yang akan dilaksanakan										Indikasi Program dan Kegiatan	300 menit	Kompilasi panduan	
3	Menyiapkan draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan										Kompilasi panduan	30 menit	Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	
4	Memeriksa dan memparaf draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan										Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	15 menit	Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	
5	Memeriksa dan memparaf draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan dan memberikan rekomendasi										Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	15 menit	Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	

No	Aktivitas	Pelaksana									Mutu Baku			Ket
		Analisis Litbang. Sosbudpem	Analisis Kebijakan	Kabid. Litbang	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Kerja Pelaksana Kajian	PPK	Mitra Kerja	Pihak-pihak Berkepentingan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu	Output	
6	Memeriksa dan memparaf draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan dan memberikan rekomendasi										Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	15 menit	Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	
7	Menandatangani draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan									Draft SK tim kerja pelaksanaan Kajian	15 menit	SK tim kerja pelaksanaan Kajian		
8	Menyusun KAK Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan									SK tim kerja pelaksanaan Kajian	1500 menit	KAK Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan		
9	Menjabarkan pelaksanaan KAK Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan									KAK Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	1500 menit	Penjabaran pelaksanaan KAK		
10	Menentukan jenis pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan									Penjabaran pelaksanaan KAK	300 menit	Jenis pelaksanaan Kajian (SIRUP)		
11	Menentukan mitra kerja pelaksanaan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan									Jenis pelaksanaan Kajian	1500 menit	Penetapan mitra kerja	SOP Pengadaan Barang/ Jasa	

No	Aktivitas	Pelaksana								Mutu Baku			Ket	
		Analisis Litbang. Sosbudpem	Analisis Kebijakan	Kabid. Litbang	Sekretaris Badan	Kepala Badan	Tim Kerja Pelaksana Kajian	PPK	Mitra Kerja	Pihak-pihak Berkepentingan	Persyaratan/ Kelengkapan	Waktu		Output
12	Melaksanakan Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan							3			Penetapan mitra kerja	3 Bulan	Hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	
13	Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD)										Hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	300 menit	Berita acara laporan hasil FGD	
14	Melaksanakan evaluasi hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan										Laporan hasil FGD	1500 menit	Evaluasi hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	
15	Membuat laporan hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan										Evaluasi hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	3000 menit	Laporan hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	
16	Mensosialisasikan hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan										Laporan hasil Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	300 menit	Laporan hasil Sosialisasi Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	
17	Mendokumentasikan dan menyimpan rekaman kegiatan Kajian										Rekaman Kajian Sosial Budaya dan Pemerintahan	30 menit	Arsip dan dokumentasi	SOP pengendalian arsip